

ADVOKASI ANGGARAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL PADA KELOMPOK MASYARAKAT RENTAN DI KOTA PAREPARE

Budget Advocacy Based On Social Inclusion For Vulnerable Community Groups In Parepare City

Jumriani

Email: jumrianisemsi@gmail.com

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Parepare

Jln. Jendral Ahmad Yani KM.6 Kota Parepare

Fajar Ladung

Email: fajarladung35@gmail.com

Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Parepare

Jln. Jendral Ahmad Yani KM.6 Kota Parepare

ABSTRAK

Inklusi sosial kini menjadi perhatian utama dalam penyusunan anggaran pemerintah, khususnya dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan. Konsep ini bertujuan untuk memastikan setiap individu memiliki akses yang setara terhadap sumber daya dan layanan publik tanpa adanya diskriminasi. Pembangunan yang inklusif memerlukan perencanaan kota yang mengakomodasi kelompok sosial yang rentan agar tidak terpinggirkan. Di Kota Parepare, data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan terdapat 7.980 jiwa masyarakat miskin pada tahun 2023, yang menegaskan pentingnya perhatian terhadap kelompok ini dalam pengalokasian anggaran. Kesenjangan sosial dan ekonomi yang dialami oleh kelompok rentan menjadi penghalang bagi tercapainya kesejahteraan yang merata, di mana kebijakan anggaran daerah berperan penting. Walaupun telah ada upaya untuk mengalokasikan anggaran, masih terdapat celah yang menunjukkan perlunya advokasi lebih lanjut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pengalokasian anggaran pemerintah daerah dan dampaknya terhadap kelompok masyarakat yang rentan, serta mengidentifikasi celah dalam kebijakan anggaran yang berlaku. Dengan pendekatan kualitatif dan analisis deskriptif statistik, penelitian ini dilakukan di 15 kelurahan di Kota Parepare, melibatkan 381 responden dari populasi masyarakat miskin. Hasil penelitian menunjukkan adanya fluktuasi dalam anggaran, namun tetap ada konsistensi dalam program-program yang berfokus pada pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar untuk kelompok rentan. Meski demikian, masih terdapat celah yang perlu diatasi agar kebijakan anggaran lebih responsif terhadap kebutuhan kelompok masyarakat rentan, sehingga inklusi sosial di Kota Parepare dapat tercapai.

Kata Kunci: Advokasi Anggaran, Inklusi Sosial, Masyarakat Rentan

ABSTRACT

Social inclusion has become a primary focus in government budget planning, particularly in the context of sustainable development. This concept aims to ensure that every individual has equal access to resources and public services without discrimination. Inclusive development requires urban planning that accommodates vulnerable social groups to prevent their marginalization. In Parepare City, data from the Central Statistics Agency indicates that there are 7,980 individuals living in poverty in 2023, underscoring the importance of prioritizing this group in budget allocation. The social and economic disparities experienced by vulnerable groups hinder the achievement of equitable welfare, wherein regional budget policies play a crucial role. Although efforts have been made to allocate budgets, gaps still exist that highlight the need for further advocacy. This study aims to analyze the mechanisms of local government budget allocation and its impact on vulnerable communities, as well as to identify gaps in the existing budget policies. Utilizing a qualitative approach and descriptive statistical analysis, this research was conducted in 15 sub-districts of Parepare City, involving 381 respondents from the impoverished population. The findings reveal fluctuations in the budget; however, there remains a consistent focus on programs related to education, health, and basic infrastructure for vulnerable groups. Nevertheless, gaps still need to be addressed to make budget policies more responsive to the needs of vulnerable communities, thereby achieving social inclusion in Parepare City.

Keywords: *Budget Advocacy, Social Inclusion, Vulnerable Communities*

PENDAHULUAN

Inklusi sosial merupakan konsep yang semakin mendapatkan perhatian dalam perencanaan anggaran pemerintah, terutama dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan. Menurut *United Nations Development Programme (UNDP)*, inklusi sosial berfokus pada memastikan bahwa semua individu, tanpa memandang latar belakang, memiliki akses yang sama terhadap sumber daya dan layanan publik (*UNDP, 2016*). Pembangunan inklusif dalam definisi spasial merupakan kebutuhan untuk merencanakan dan merancang kota sehingga kelompok sosial yang rentan tidak terdesak, terisolasi, dan terpinggirkan dari layanan perkotaan, fasilitas, arus komersial, dan pekerjaan (*Espino, 2015*). Menurut (*Yusadiredja, 2021*), Kebijakan publik yang inklusif merupakan salah satu syarat yang penting jika Indonesia ingin mencapai target penurunan kemiskinan dan pembangunan yang berkesinambungan. Para pengambil kebijakan diharapkan dapat memahami bahwa masih terdapat banyak ketimpangan sosial yang dialami kaum perempuan, disabilitas, dan kaum marjinal lainnya.

Oleh karena itu, penelitian berwawasan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)* akan dapat memberikan kontribusi untuk perencanaan kebijakan yang

lebih adil dalam mengatasi berbagai masalah kesenjangan yang dialami. Kesetaraan Gender, Disabilitas dan Inklusi Sosial merupakan respon terhadap krisis kemanusiaan bagian dari program perlindungan sosial dan inisiatif pembangunan untuk mengurangi kemiskinan, mendorong inklusi dan pemberdayaan kelompok marginal. Terdapat bukti global yang kuat bahwa, rata-rata, bantuan tunai mengurangi kemiskinan moneter, meningkatkan kehadiran di sekolah, dan penggunaan layanan kesehatan, mengurangi pekerja anak dan meningkatkan kekuatan dan pilihan perempuan dalam pengambilan keputusan (GEDSI, 2023).

Dalam undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia, pada pasal 5 penjelasan ayat 3 menyatakan bahwa kelompok Masyarakat yang rentan antara lain adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil dan penyandang cacat. Menurut pakar *SDGs Center Unpad*, (Yusuf, Arief A., et., 2023) dalam penelitiannya menemukan bahwa lansia dan penyandang disabilitas, terutama di daerah perdesaan adalah kelompok yang paling tertinggal di Indonesia dalam banyak aspek SDGs, seperti Tingkat Pendidikan yang rendah, akses terhadap teknologi, dan tidak memiliki akses terhadap institusi finansial. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh (Arawindha, 2023) mengungkapkan bahwa aksi sosial yang dilakukan merupakan bentuk gerakan sosial baru, karena mengusung isu kemanusiaan. Selain itu, dalam melakukan aksi sosial, memanfaatkan media sosial dalam memberikan edukasi dan *disability awareness* pada masyarakat..

Di Kota Parepare, kelompok Masyarakat rentan seperti penyandang disabilitas, Perempuan, anak-anak, dan Masyarakat miskin sering terpinggirkan dalam proses perencanaan anggaran. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Parepare menunjukkan bahwa terdapat 7,980 jiwa Masyarakat miskin di tahun 2023, ini menunjukkan perlunya perhatian khusus terhadap kelompok masyarakat rentan dalam alokasi anggaran daerah. Berikut data penduduk miskin di Kota Parepare.

Tabel 1. Jumlah Penduduk dan penduduk Miskin 2019-2023

URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Penduduk	145.180	151.454	152.922	154.854	160.309
Penduduk Miskin	7.620	7.960	7.930	8.010	7.980
Persentase	5,26%	5,44%	5,4%	5,42%	5,34%

Sumber: BPS Kota Parepare Tahun 2023

Dari data tersebut di atas menunjukkan penduduk miskin di Kota Parepare berfluktuatif dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, meski naik turunnya tidak terlalu mencolok namun harus menjadi bahan evaluasi dalam mengadvokasi kebijakan anggaran yang telah dilakukan, karena angkanya masih stabil di angka 5% lebih. (Kurniawan, 2018) menyatakan bahwa alokasi anggaran yang tepat dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, yang pada akhirnya mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi kelompok yang rentan. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan anggaran yang tidak inklusif dapat memperburuk ketidakadilan sosial dan memperdalam kesenjangan ekonomi.

Kesenjangan ekonomi dan sosial yang dialami oleh kelompok masyarakat rentan, seperti penduduk miskin, penyandang disabilitas, dan kelompok berpendidikan rendah, seringkali menjadi hambatan dalam mencapai kesejahteraan yang merata. Salah satu faktor kunci yang mempengaruhi inklusi sosial kelompok ini adalah kebijakan anggaran yang diimplementasikan oleh pemerintah daerah. Pemerintah memiliki peran penting dalam alokasi anggaran yang berkeadilan untuk mendukung program dan kegiatan yang menjawab kebutuhan spesifik kelompok rentan. Di Kota Parepare, meskipun telah terdapat upaya pengalokasian anggaran bagi kelompok masyarakat rentan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), masih terdapat berbagai kesenjangan yang mengindikasikan perlunya advokasi lebih lanjut terkait alokasi anggaran berbasis inklusi sosial.

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana proses pengalokasian anggaran oleh pemerintah daerah dapat berkontribusi dalam menciptakan inklusi sosial bagi kelompok masyarakat rentan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan dalam kebijakan anggaran yang ada, penelitian ini bertujuan pula menganalisis efektivitas kebijakan anggaran pemerintah daerah dalam mendukung kelompok masyarakat rentan di Kota Parepare, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih inklusif guna mengatasi kesenjangan yang masih ada. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah dalam perbaikan kebijakan anggaran yang lebih responsif terhadap kebutuhan kelompok masyarakat rentan, serta mendorong terciptanya inklusi sosial yang lebih merata di Kota Parepare.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berjudul Advokasi Anggaran Berbasis Inklusi Sosial Pada Kelompok Masyarakat Rentan di Kota Parepare. Dalam penelitian ini, dilakukan analisis terhadap proses pengalokasian anggaran pemerintah daerah serta dampaknya terhadap kelompok masyarakat rentan, khususnya dalam menciptakan inklusi sosial. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Parepare yang meliputi 15 kelurahan di 4 kecamatan. Pengambilan sampel dilakukan menggunakan rumus Slovin dengan tingkat signifikansi 5%, menghasilkan sampel sebanyak 381 responden yang mewakili kelompok masyarakat rentan di Kota Parepare. Sampel ini diambil dari populasi masyarakat miskin yang berjumlah 7,980 jiwa (BPS, 2023). Kriteria pemilihan sampel meliputi distribusi penduduk miskin, disabilitas, tingkat pendidikan, akses kesehatan, serta infrastruktur dasar. Waktu pelaksanaan penelitian adalah tahun 2024, dan data yang dianalisis mencakup periode APBD dari tahun 2021 hingga 2023.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dikombinasikan dengan analisis deskriptif statistik. Analisis Deskriptif Statistik digunakan untuk mengolah data hasil survei, termasuk perhitungan rata-rata, median, modus, standar deviasi, serta distribusi dan representasi data dalam bentuk tabel dan grafik. Metode ini digunakan tanpa menggunakan formula probabilistik. Rujukan utama untuk analisis deskriptif ini adalah (Wahyuni., 2020). Analisis Kesenjangan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI) digunakan untuk mengevaluasi apakah kebijakan anggaran yang diterapkan oleh pemerintah telah mencakup dan memberikan manfaat bagi kelompok masyarakat rentan, terutama perempuan dan disabilitas. Analisis ini membantu memahami bagaimana anggaran pemerintah berperan dalam menciptakan kesetaraan akses terhadap hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, dan pekerjaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan anggaran pemerintah menjadi hal penting dalam proses distribusi anggaran berkeadilan, hal ini sesuai dengan pernyataan (Arodhiskara Yadi, 2023), menyatakan bahwa menyatakan bahwa pemerintah memiliki peran penting dalam mengalokasikan sumber daya ke berbagai program untuk memastikan seluruh kebutuhan warga negara terpenuhi secara adil. Pengambilan keputusan kebijakan anggaran oleh lembaga eksekutif dan legislatif sebagaimana yang tertuang dalam Perda APBD

(Anggaran, Pendapatan, dan Belanja Daerah) diharapkan dapat mengakomodisasi aspirasi masyarakat yang tentunya bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, (Herman, 2022). Dalam APBD Kota Parepare periode tergambar kebijakan anggaran pada kelompok masyarakat rentan dalam 3 tahun terakhir sesuai dengan Tabel 1 dibawah ini.

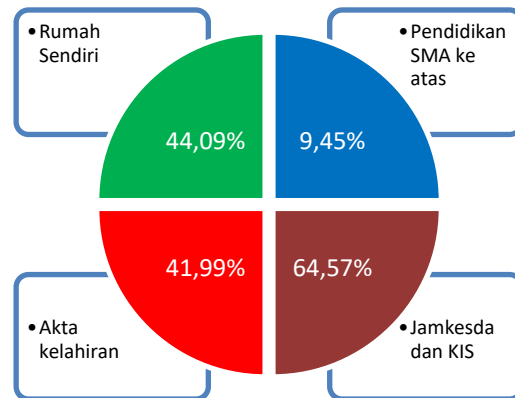
Tabel 2. Anggaran, Program dan Kegiatan Masyarakat Rentan Pada APBD Kota Parepare Periode Tahun 2021-2023

No	U R A I A N	T A H U N		
		2021	2022	2023
1	APBD	Rp.951.776.750.393	Rp.923.238.509.528	Rp.924.595.555.607
2	Anggaran Masyarakat Rentan	Rp.176.726.807.290	Rp. 88.918.439.836	Rp. 96.536.882.908
3	Organisasi Perangkat Daerah	12	20	19
4	Program	24	23	27
5	Kegiatan	86	60	67

Sumber : Bappeda Kota Parepare

Dari data di atas menunjukkan bahwa naik turunnya anggaran untuk masyarakat rentan, akan mengikuti perkembangan APBD. Fluktuasi anggaran yang terjadi tidak menghilangkan kepedulian pemerintah daerah dalam mendukung masyarakat rentan, penurunan dapat mencerminkan kondisi ekonomi atau prioritas anggaran lainnya, namun upaya untuk memperkuat kelompok masyarakat rentan tetap cukup signifikan, dimana pada tahun 2022 ada 60 kegiatan, naik menjadi 67 kegiatan di tahun 2023, menunjukkan adanya konsistensi kebijakan anggaran oleh pemerintah daerah Kota Parepare kepada masyarakat rentan.

Kebijakan anggaran dalam APBD Kota Parepare bagi masyarakat rentan ditujukan pada program dan kegiatan yang terkait dengan angkatan kerja pendidikan, akses kesehatan, infrastruktur dasar dan ketahanan pangan. Namun dari hasil survei yang dilakukan ada beberapa temuan yang menunjukkan bahwa kebijakan tersebut belum secara langsung menyelesaikan kesenjangan pada kelompok masyarakat rentan, hal ini terlihat pada gambar berikut ini.



Gambar 1. Kesenjangan Pada Kelompok Masyarakat Rentan

Dalam kerangka analisis kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial (GEDSI) memberikan perhatian khusus pada kesetaraan gender dan kelompok masyarakat rentan lainnya termasuk kelompok disabilitas. Sesuai dengan data BPS Kota Parepare tahun 2023 jumlah penduduk Kota Parepare sebanyak 160.309 jiwa dan 50,25% adalah perempuan. Sesuai dengan temuan kesenjangan pada Gambar 1, maka dampaknya sangat dirasakan perempuan sebagai penduduk mayoritas dan juga kelompok masyarakat rentan lainnya.

1. Kepemilikan Rumah; kesenjangan yang signifikan dalam kepemilikan rumah, hanya 44,09% masyarakat rentan yang memiliki rumah sendiri. Kenyataan ini menunjukkan bahwa sebagian besar kelompok ini tergantung pada tempat tinggal sewa atau menumpang di rumah keluarga. Hal ini dapat mengakibatkan tingginya resiko ketidakstabilan ekonomi bagi kelompok ini, disebabkan biaya sewa rumah yang akan terus mengalami peningkatan, disamping kurangnya jaminan keamanan tempat tinggal.
2. Pendidikan; Dalam aspek pendidikan menunjukkan bahwa kelompok masyarakat rentan hanya 9,45% yang menyelesaikan pendidikan di tingkat SMA hingga Universitas, selebihnya atau 90,55% tidak mampu menyelesaikan pendidikannya bahkan tidak bersekolah sama sekali. Kondisi ini sangat memprihatinkan dan menjadi hambatan besar dalam meningkatkan mobilitas sosial dan ekonomi, karena rendahnya tingkat pendidikan akan berkorelasi langsung kesempatan kerja yang layak.
3. Kepemilikan Akta kelahiran; Kesenjangan kepemilikan akta kelahiran sangat mengkhawatirkan, dari data hanya 41,99% kelompok masyarakat rentan yang memiliki akta kelahiran. Tanpa adanya akta kelahiran, individu rentan kehilangan

akses terhadap banyak hak dasar, termasuk pendidikan, layanan kesehatan, dan pekerjaan formal.

4. Akses kesehatan (JAMKESDA dan KIS); Akses kesehatan pada kelompok masyarakat rentan menunjukkan hasil yang lebih baik, dengan 64,57% telah memiliki Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS). Namun masih ada sekitar sepertiga kelompok masyarakat rentan yang belum memiliki akses layanan terhadap layanan kesehatan ini.

Dari hasil wawancara mendalam dalam pelaksanaan FGD, kelompok masyarakat rentan mengusulkan beberapa hal yang dapat dilakukan dan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah Kota Parepare dalam mengatasi kesenjangan bagi kelompok masyarakat rentan. Hal ini diuraikan dalam tabel 3 berikut ini:

Tabel 3. Peluang Kebijakan Anggaran bagi Pemerintah Kota Parepare

No.	Kesenjangan	Peluang dalam Kebijakan Anggaran
1.	Kepemilikan Rumah	1. Program Subsidi Perumahan 2. Program Penyediaan tanah untuk Pembangunan Rumah Sederhana 3. Program Rumah Susun Bersubsidi
2.	Akses Pendidikan	1. Beasiswa bagi Masyarakat rentan 2. Pelatihan Keterampilan Khusus
3.	Dokumen Kependudukan	1. Pendataan Ulang Penduduk di Wilayah Cakupan Rendah KK 2. Pelayanan Jemput Bola Pengurusan KK
4.	Akses Kesehatan	1. Peningkatan Cakupan Akses Jamkesda 2. Pendataan Ulang Pemilik Jamkesda 3. Program Preventif Kesehatan bagi Masyarakat rentan

Tabel 3 menggambarkan peluang kebijakan anggaran yang dapat diambil oleh Pemerintah Kota Parepare untuk mengatasi kesenjangan di masyarakat, khususnya terkait kepemilikan rumah, akses pendidikan, dokumen kependudukan, dan kesehatan. Dalam hal kepemilikan rumah, pemerintah dapat menyediakan subsidi perumahan, tanah untuk rumah sederhana, serta program rumah susun bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal. Untuk meningkatkan akses pendidikan, peluang kebijakan meliputi pemberian beasiswa bagi masyarakat rentan dan pelatihan keterampilan khusus, yang bertujuan membantu mereka meningkatkan taraf hidup melalui pendidikan dan keterampilan yang lebih baik. Sedangkan dalam hal

dokumen kependudukan, pendataan ulang dan pelayanan jemput bola pengurusan Kartu Keluarga dapat memastikan setiap warga tercatat dan memiliki akses yang sama terhadap layanan pemerintah.

Pada akses kesehatan, kebijakan yang bisa diambil meliputi peningkatan cakupan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) serta pendataan ulang penerima Jamkesda untuk memastikan ketepatan sasaran. Program preventif kesehatan juga bisa diimplementasikan untuk mencegah penyakit di kalangan masyarakat rentan. Melalui kebijakan ini, diharapkan kesenjangan sosial dapat dikurangi, dan layanan publik lebih merata bagi seluruh masyarakat. Secara umum berdasarkan survei yang dianalisis dengan analisis kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial maka kelompok masyarakat rentan yang puas 40,03%, tingkat kepuasan ini menunjukkan persentase yang rendah, untuk meningkatkan tingkat kepuasan kelompok masyarakat rentan maka perlu disusun kebijakan anggaran yang didasarkan atas masukan dan kebutuhan anggaran berbasis inklusi sosial, hal ini menjadi peluang bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan peran serta masyarakat rentan dalam proses pembangunan berkelanjutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi fluktuasi anggaran bagi kelompok masyarakat rentan dalam APBD Kota Parepare 2021-2023, pemerintah daerah secara konsisten tetap menyiapkan program dan kegiatan untuk masyarakat rentan. Namun, kesenjangan masih terdapat dalam aspek kepemilikan rumah, pendidikan, dan dokumen kependudukan. Kelompok masyarakat rentan, terutama perempuan, mengalami dampak terbesar, meski akses kesehatan menunjukkan hasil yang lebih baik.

Saran dalam penelitian ini yakni: Pemerintah Kota Parepare perlu memperluas subsidi perumahan, meningkatkan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan, serta memperbaiki pendataan penduduk dan cakupan layanan kesehatan bagi masyarakat rentan agar kebijakan lebih tepat sasaran dan efektif dalam mengurangi kesenjangan sosial.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih Tim Peneliti ucapkan kepada Kemendikbud Ristek atas pendanaan Penelitian Dosen Pemula DRTPM Kemendikbud Ristek 2024 dan juga kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Parepare

(LPPM UMPAR) yang telah membimbing dan membantu proses penyusunan hingga penyelesaian penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Arawindha, U. (2023). Advokasi Hak Penyandang Disabilitas sebagai Gerakan Sosial Baru di Kota Semarang. *Inklusi*, 10(2), 175–196. <https://doi.org/10.14421/ijds.100203>
- Arodhiskara, Yadi, and M. N. (2023). “Effectiveness Of Direct Cash Assistance Policy Village Funds On Economic Recovery During The Covid-19 Pandemic.” *Journal AK-99*, 3(1), 130–137.
- BPS. (2023). *Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa) Menurut Provinsi dan Daerah*.
- Creswell, J. W. (2014). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Yogyakarta, *Pustaka Pelajar*.
- Espino, N. A. (2015).). *Building the Inclusive City: Theory and Practice for Confronting Urban Segregation*.
- GEDSI. (2023). *Gender Equality , Disability and Social Inclusion (GEDSI) Analysis : Rapid review to inform cash programming in Solomon Islands and Vanuatu*. May 2023, 1–10.
- Herman, H. (2022). *PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN PESISIR SELATAN*. 6(1), 94–103.
- Kurniawan, A. (2018). Peran Kesadaran Pendidikan dalam Perencanaan Keuangan Keluarga. *Jurnal Manajemen Keuangan Keluarga*, 6(1), 45-58.
- UNDP. (2016). *Human Development Report 2016*,. Oxford University Press, New York.
- Wahyuni., M. (2020). *Statistik Deskriptif untuk Penelitian Olah Data Manual dan SPSS Versi 25*. Yogyakarta: *Bintang Pustaka*.
- Yusadiredja, I. N. (2021). *Evaluasi Pengarusutamaan Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial pada Riset Universitas Melalui Hibah Penelitian Kementerian Riset, Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional 2017 - 2020*.
- Yusuf, Arief A., et., A. (2023). *Seri Menyongsong SDGs: Kesiapan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat*. Bandung: *Unpad Press*.